



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUR SAIDAH**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**
3. NHK : **1036059**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **589.000.000**

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
2. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 145.500.000
3. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.250.000
4. Tanah Seluas 182 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 55.250.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 352.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **138.250.000**

1. MOBIL, SUZUKI SUZUKI ERTIGA GL Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA BEAT 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.250.000
3. MOTOR, HONDA HONDA VARIO 125 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
4. MOTOR, HONDA HONDA ADV 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **51.892.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	40.370.893
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	819.512.893
III. HUTANG	Rp.	166.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	653.512.893

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.